



# Cirebon Katon

Berita & Informasi Wakil Rakyat

## Meneropong Cirebon 2024



# Semangat Berperan



Arah kebijakan pembangunan suatu daerah, biasa dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal itu merupakan acuan program prioritas selama 5 tahun. Isinya berupa detail langkah dan strategi untuk mencapai target yang telah ditetapkan kepala daerah. Lantas bagaimana dengan RPJMD Kabupaten Cirebon?

Pada edisi Juli ini, sengaja Cirebon Katon menyuguhkan bahasan perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024 dengan tema "Meneropong Cirebon 2024". Tema ini menarik untuk dibahas, sebab kita akan diajak untuk melihat dengan jarak jauh, apa yang menjadi upaya Pemerintah Kabupaten Cirebon hingga 2024 nanti.

Upaya baru dalam arah kebijakan dan langkah strategis pada perubahan RPJMD menjadi penting untuk diketahui seluruh elemen masyarakat Kabupaten Cirebon. Dengan harapan, semua akan saling berperan sesuai tempatnya masing-masing agar tercapainya cita-cita Kabupaten

Cirebon yang telah ditentukan.

Begitu pun dengan kami, yang berperan terus-menerus menyajikan informasi menarik kepada khalayak. Sementara para pembaca juga berperan memberi masukan, ide dan saran kepada kami.

Kami telah mendapat laporan daya tarik pembaca yang semakin meningkat dan positif. Ini menjadi penyemangat kami untuk senantiasa berbenah diri dan terus berinovasi.

Berperan dan terus berinovasi semaksimal mungkin menjadi modal kami. Sebagaimana kami belajar dari kisah Siti Hajar istri Ibrahim AS, saat membawa Ismail kecil yang kehausan mencari sumber air seraya tetap berdoa.

Peran dari kisah Siti Hajar, dapat memotivasi dan memberi pelajaran, jika kita kaitkan dengan kondisi saat ini. Salah satunya, dengan berperan sungguh-sungguh menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti apa yang telah dianjurkan pemerintah. Bertepatan dengan itu, kami ucapkan selamat hari raya iduladha 1442 H. Selamat membaca Cirebon Katon.

#### Pembina/Penasehat :

**H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si**  
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

**Rudiana, SE**  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

**Teguh Rusiana Merdeka, SH**  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

**Drs. H. Subhan**  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

#### Pengarah :

**Muklisin Nalahudin, SH, MH.**  
(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

**Munawir, SH.**  
(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

**Abdul Rohman**  
(Ketua Komisi 1)

**Mad Saleh**  
(Ketua Komisi 2)

**H. Hermanto, SH**  
(Ketua Komisi 3)

**Siska Karina, MH**  
(Ketua Komisi 4)

#### Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi :

**Ikin Asikin, S.Sos, M.Si**  
(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

#### Wakil Pimpinan Redaksi :

**Drs. Raden Chaidir Susilaningrat**  
(Kabag persidangan)

**Drs. H. Sucipto, MM**  
(Kabag Perundang-undangan)

#### Redaktur Pelaksana :

**Mochammad Nurhiyana, S.STP., M.Si**  
(Kasubag Humas dan Protokol)

#### Redaksi Ahli :

**S. Yudi**

#### Penyunting :

**Wiwin Winarti, S.IP**  
(Kasubag Rapat dan Risaiah)

**Ardiles Afla Jatiwanto**  
(Kasubag Rumah Tangga)

#### Redaktur :

**Yusuf**

#### Reporter :

**Maulana • Mu'izz • Hasan • Sarah**

#### Fotografer :

**Qushoy**

#### Desain Grafis :

**Boyke Datu • Andri**

#### Data dan Riset :

**Oman**

#### Distribusi :

**Firman • Misbah**

#### Korespondensi:

**redaksi.cika@gmail.com**

#### Penerbit :

**Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon**

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon

• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611



## 04 | FOKUS

Berjibaku Sesuai Program Prioritas Daerah

6 | Cerita Perjalanan Perubahan RPJMD

12 | Meneropong Capaian Kinerja 2024

15 | Indikator Keberhasilan Kinerja 2024



## 18 | KILAS

Ikuti Pelantikan SOTK Baru



## 20 | INSPIRASI

Amura  
Jamur Crispy Yang Diekspor Hingga Prancis



## 22 | LENSA

Lembayung Senja di Embung Wanakaya



## 24 | PROFIL

Mohammad Ridwan:  
Jangan Jadi Manusia Rugi

26 | Rohayati  
Miliki Trah Marhaenis Nasionalis

## 28 | DINAMIKA

Seminar Investasi Upaya Membuka Industrialisasi

30 | Kaji Perubahan Raperda Perlindungan  
Perempuan dan Anak

32 | Sepakati Perda Perubahan Ketertiban Umum

34 | Tujuh Catatan Realisasi APBD 2020



## 36 | POTENSI

Kampung Domba  
Hadirkan Edukasi dan Pemberdayaan Warga

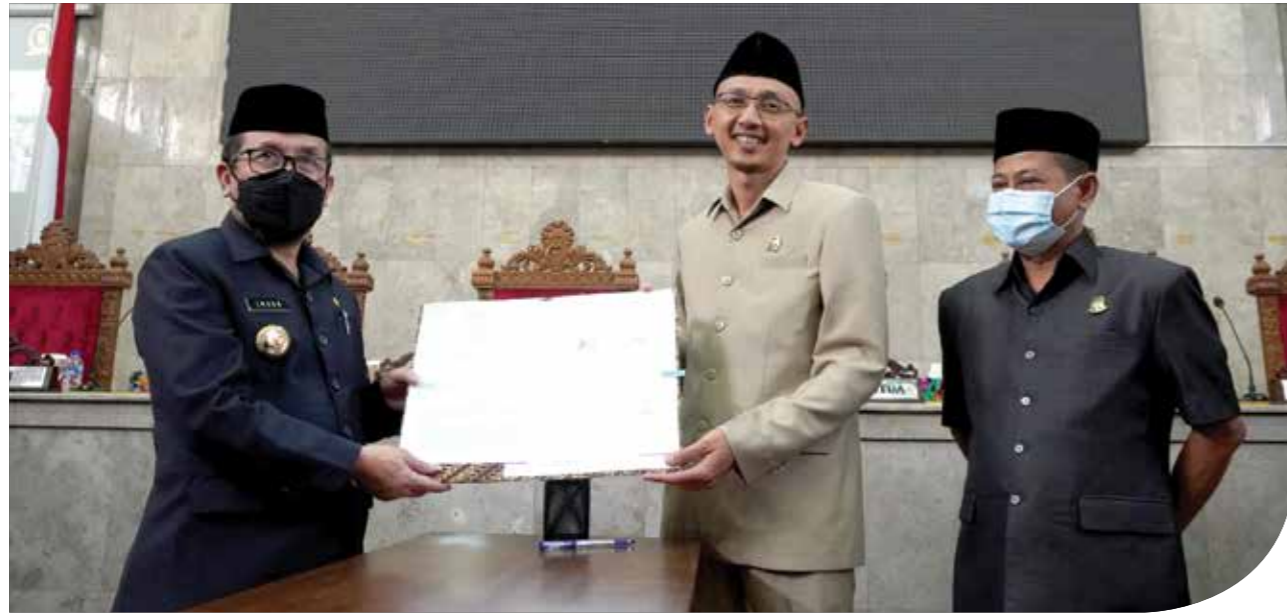


## 38 | DESA

Setu Wetan  
Prioritaskan Program Perangi Sampah

## Berjibaku Sesuaikan Program Prioritas Daerah

Draft raperda perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 telah disahkan pada Mei lalu. Bappelitbangda telah mengebut sejak 2020. Apa yang melandasinya?



Rancangan perubahan peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon 2019-2024 telah digulirkan. Perjalanannya telah dimulai sejak awal 2020 lalu.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun, terhitung sejak kepala dan wakil kepala daerah dilantik. Salah satu isinya memuat penjabaran dari visi misi dan program yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan daerah.

Dalam proses penyusunannya, perubahan RPJMD diharuskan mengacu pada Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cirebon. Sementara dasar yuridisnya, ada peraturan yang menguatkan perubahan

RPJMD di antaranya: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019, PP Nomor 72 Tahun 2019, Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Selain itu, Pasal 264 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menyatakan RPJPD, RPJMD maupun RKPD dapat diubah berdasarkan pengendalian dan evaluasi yang ditemukan atau jika ada ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Saat ini, keadaan ketidaksesuaian disebabkan kejadian luar biasa wabah pandemi Covid 19 dan ditetapkan sebagai bencana nasional sejak Maret 2020 yang menyerang seluruh negara. Alhasil, berdampak sangat besar terhadap berbagai sektor. Termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun

2020 yang imbasnya *refocusing* maupun realokasi anggaran.

Alasan kedua, Bappelitbangda Kabupaten Cirebon berapriori, jika Kabupaten Cirebon akan dihadapkan dengan kondisi yang luar biasa dan lebih menantang setelah dampak pandemi meluluhlantahkan seluruh sektor pembangunan.

"Kita meyakini itu akan terjadi pada tahun yang akan datang, setelah dampak pandemi ini begitu terasa," jelas Furqon Hendra, Kasubid Perencanaan dan Pengendalian Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

Sehingga perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon pun menjadi keniscayaan. Prosesnya telah dimulai sejak triwulan pertama 2020. Setidaknya ada empat tahap yang dilakukan oleh Bappelitbangda untuk me-



realisasikannya. Pertama, tahap evaluasi RPJMD murni yang menghasilkan kesepakatan untuk merubah RPJMD.

"Setelah kita menganalisis dan mengevaluasi dari dokumen murni RPJMD. Akhirnya kita merekomendasikan untuk merubah RPJMD. Menyesuaikan dengan kondisi yang memang paling sesuai dengan keadaan sekarang," kata Furqon.

Furqon menjelaskan, setelah tahapan analisis dan evaluasi pada dokumen RPJMD 2019-2024 murni dilakukan, tahap kedua yakni penyampaian hasil dengan menggelar rapat bersama bupati, untuk menggambarkan kondisi dan capaian Kabupaten Cirebon maupun mengenai perubahan regulasi hingga terbit draft evaluasi.

Setelah menjadi draft evaluasi, lalu lahirlah rancangan awal perubahan Perda Nomor 7 Ta-

hun 2019 tentang RPJMD.

Pasca itu, Bappelitbangda Kabupaten Cirebon pun berjibaku menyiapkan rancangan perubahan RPJMD. Tahap selanjutnya dibawah pada konsultasi publik untuk menyerap aspirasi dari seluruh *stakeholder* pada akhir 2020.

"Kita mendiskusikannya dengan para pemangku kepentingan. Apa yang mesti dilakukan untuk mengejar dampak pandemi ini?" paparnya.

Tahap ketiga yakni pada April 2021, Bappelitbangda juga telah menggelar musyawarah rencana pembangunan daerah (Musrenbang) dengan membawa naskah perubahan RPJMD. "Perbedaan Musrenbang dengan konsultasi publik. Kalau di Musrenbang sudah bicara apa yang bisa disinergikan dengan SKPD lain maupun dengan pihak eksternal," jelas Furqon.

Hasil Musrenbang itu, kemu-

dian menghasilkan perumusan berita acara rancangan akhir perubahan RPJMD yang selanjutnya dibuat kajian dan meminta pandangan dengan DPRD Kabupaten Cirebon.

Rancangan akhir RPJMD, kemudian bertransformasi menjadi rancangan peraturan daerah (raperda). Setelah itu membahasnya kembali dengan DPRD untuk mendengar masukan, saran hingga kritik sebelum disahkannya menjadi Perda.

"Rancangan akhir ini telah kita sampaikan pada rapat paripurna, semua menerima dan memberi masukan dalam perubahan RPJMD. Seluruh fraksi DPRD pun telah menyampaikan pandangannya," terangnya.

Setelah perda perubahan RPJMD disahkan bersama pada 28 Mei lalu, maka tahap terakhir adalah fasilitasi untuk disampaikan ke provinsi guna ditinjau dan dievaluasi agar tak berbenturan dengan RPJMD provinsi.

"Sekarang sedang proses tunggu hasil kajian provinsi. Hasil fasilitasi itu nantinya dikeluarkan melalui keputusan Gubernur Jawa Barat. Bulan ini kita akan menunggu hasilnya," paparnya.

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Suhartono, mengaku perubahan RPJMD ini tak lain bukan merubah keseluruhan RPJMD murni. Namun hanya menyesuaikan dengan kondisi yang menjadi skala prioritas.

"Jadi yang tadinya sektor-sektor ada yang berada di bawah prioritas kita naikkan menjadi utama. Seperti sektor pertanian yang mampu bertahan sekalipun pandemi. Karena kalau pertanian itu tidak akan berhenti. Setiap orang perlu makan. Kita akan prioritaskan pembenahan itu salah satunya," katanya. •suf

# Cerita Perjalanan Perubahan RPJMD

Ada dinamika perjalanan perubahan RPJMD sebelum disahkannya menjadi perda. Bagaimanakah?



Setelah rancangan awal raperda perubahan RPJMD 2019-2024 dihantarkan Bupati Cirebon Imron Rosyadi melalui rapat paripurna pada 7 Mei 2021. DPRD Kabupaten Cirebon pun dengan cepat dan trengginas mengawal tahapan penyusunannya.

Penyusunan raperda Perubahan RPJMD melewati beberapa tahapan. Mulai dari penyampaian dokumen rancangan awal oleh Bupati, Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda), pemandangan umum fraksi, jawaban bupati, pem-

bentukan pansus DPRD hingga persetujuan DPRD.

Kasubid Perencanaan dan Pengendalian Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Furqon Hendra mengatakan, penyusunan raperda Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024 yang dimulai sejak 2020 ini berjalan lancar. Bahkan, Furqon mengklaim DPRD mendukung penuh raperda ini.

“DRPD sangat mengapresiasi perubahan RPJMD ini. Bahkan, raperda ini didukung dan harus segera dirubah karena sudah tidak memungkinkan untuk diselaraskan,” ungkapnya.

## Mohammad Luthfi: Perlu Alat Ukur dalam Perubahan RPJMD

Pada 5 Mei 2021, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi menghadiri Musrenbang Perubahan RPJMD 2019-2024 Kabupaten Cirebon di Hotel Patra Cirebon. Ia pun berpendapat, beberapa isu strategis dalam dokumen perubahan RPJMD yang harus memiliki turunan utuh dan strategi yang tepat.

“Target sarannya, misalkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang lebih merata. Kemudian sasaran strategisnya, meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Adapun indikatornya PDRB sektor pertanian meningkat, PDRB industri

olahan meningkat, PDRB perdagangan meningkat,” katanya.

Luthfi menyadari, Kabupaten Cirebon masih jauh tertinggal dengan daerah lain. Contohnya dalam PDRB per kapita, yang hanya mampu menghasilkan Rp 22 juta per tahun.

Untuk itu, diperlukan akselerasi pembangunan yang menjadi sasaran dalam raperda perubahan RPJMD ini. Selain itu, tak kalah penting sebuah alat ukur dalam mengukur keberhasilan RPJMD. Sebab, akan sangat berguna untuk mengetahui sudah sejauh mana dan bagaimana mencapai target.

“Contohnya, peningkatan PDRB sektor pertanian. Itu dari berapa menjadi berapa? Ini harus ada di RPJMD. Hari ini PDRB pertanian kurang lebih di angka 20%. Perdagangan 19%. Kita mau tingkatkan menjadi berapa?” terangnya.

Sehingga, tak kalah penting peran yang jelas dalam pembagian tugas organisasi perangkat daerah (OPD) agar tak ada ego sektoral. Luthfi meyakini, mimpi bersama tentang masa depan Kabupaten Cirebon dalam perubahan RPJMD bisa menjadi kenyataan. Prinsipnya hanya satu, yakni tekad.



## Fraksi DPRD Beri Catatan Perubahan RPJMD

Setelah Musrenbangda dilaksanakan dalam perubahan RPJMD. Tahap selanjutnya yakni mendengarkan pandangan dan masukan dari seluruh fraksi DPRD Kabupaten Cirebon pada paripurna 17 Mei 2021 lalu.

Pertama, fraksi PKB, menyoroti pemda agar memperhatikan angka kemiskinan dan pembangunan infrastruktur wilayah. Mereka juga mengimbau agar pemda dapat meningkatkan SDM yang lebih maju dan berdaya saing serta peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan teknologi dan informasi.

Kedua, fraksi PDIP yang memprioritaskan peningkatan infrastruktur dan tata ruang, peningkatan sumberdaya manusia serta terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram.

Sementara fraksi Partai Nasdem meminta Pemkab Cirebon untuk tetap mempertimbangkan program yang sempat ditangguhkan agar dikaji kembali.

Keempat, fraksi Golkar yang meminta Pemkab memperhatikan angka pengangguran, pemanfaatan potensi sumber daya daerah dan isu pemekaran Cirebon timur agar dilakukan kajian

lebih matang terlebih dahulu.

Kelima, fraksi Gerindra menyampaikan, perlunya perencanaan matang dalam target pembangunan daerah dan peningkatan IPM. Selanjutnya fraksi PKS, yang menyoroti capaian kesehatan yang tak berbanding lurus dengan besarnya anggaran kesehatan.

Terakhir, giliran Partai Demokrat yang berharap raperda ini akan mampu atasi masalah populis, pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif serta angka kebahagiaan warga masyarakat yang meningkat.



## Imron Rosyadi: Kita Ingin Entaskan Persoalan Populis

Setelah mendengar masukan dan kritik dari seluruh fraksi DPRD Kabupaten Cirebon. Bupati Cirebon, Imron Rosyadi pun memberikan jawabannya, melalui paripurna jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi pada 18 Mei 2021.

Menurutnya, perubahan RPJMD tidak lain bertujuan untuk mengentaskan berbagai hal. Pertama, pemerintah daerah tengah berupaya menyelesaikan masalah infrastruktur dan tata ruang yang cukup kompleks.

Kedua, peningkatan SDM yang menjadi prioritas utama, karena salah satu faktor penting

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Peningkatan tersebut merupakan kekuatan sektoral guna menambah pengetahuan, keterampilan dan daya saing.

Ketiga, pengentasan kemiskinan dari 7,7 persen menjadi 10,84 persen.

"Kita akan fokuskan pelayanan kebutuhan dasar warga miskin, perlindungan jaminan sosial, pemulihan ekonomi serta program layanan kesehatan yang lebih tangguh," ungkapnya.

Demikian juga mengenai pengangguran yang ada di Kabupaten Cirebon, pemerintah

akan berupaya meningkatkan investasi setelah dampak pandemi berdampak pada angka pengangguran yang semakin tinggi.

"Kami akan terus berupaya untuk membenahi semua. Pada tahun 2020 angka pengangguran kita terkoreksi 11,52 persen dari target awal 9,11 persen. Harapan kami angka tersebut bisa menurun sampai 9,9 persen di akhir tahun 2024," tuturnya.

Terakhir, mengenai isu pemekaran Cirebon timur, kata Imron, akan mengkajinya matang berlandaskan kepentingan rakyat, bukan kepentingan elit politik atau kelompok tertentu.





### Pansus Sepakati Isi Perubahan RPJMD

Setelah jawaban bupati tersebut dirasa cukup, selanjutnya DPRD Kabupaten Cirebon membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas raperda ini. Adapun susunan personalia pansus ini terdiri dari ketua yang dijabat Hermanto, Wakil Ketua Pansus I Diah Irwany Indriyati.

Raperda perubahan RPJMD 2019-2024 dinilai telah tersusun sistematis, terstruktur dan berbasis keruangan setelah Pansus I mengkaji rancangan awal dan rancangan akhirnya. Artinya, in-

dikator tujuan, sasaran dan arah kebijakan dalam raperda yang akan disahkan ini sudah jelas.

“Tetapi yang terpenting, substansi dasar ini harus lebih kita sikapi dengan penuh kesadaran. Relevansi raperda ini harus dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang,” ujar Diah Irwany Indriyati.

Diah juga menilai, hampir seluruh isu strategis dalam raperda perubahan RPJMD 2019-2024 telah sesuai dengan persoalan Kabupaten Cirebon. Untuk itu agar dapat terealisasi dengan

baik, pemerintah daerah harus lebih pintar, kuat, kreatif dan aktif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat.

“Genjot capaian PAD melalui kebijakan dan program yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Bangun juga sinergitas antar kewilayahannya. Sebab, ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi masih diperlukan selagi optimalisasi potensi SDA maupun SDM kita belum terekplor dengan baik,” katanya.

### Perda Perubahan RPJMD Disahkan

Tepatnya 28 Mei 2021 lalu, tiba waktunya memasuki tahap akhir penyusunan raperda RPJMD 2019-2024. Pada siang itu, ruangan paripurna tampak ramai. Separuh lebih atau 35 anggota DPRD Kabupaten Cirebon hadir guna membahas pengesahan Perda Nomor 7 Tahun 2019.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi. Setelah Wakil Ketua Pansus I Diah Irwany Indriyati membacakan laporan hasil pembahasan pansus I, Luthfi pun bertanya kepada para ang-

gota DPRD yang hadir. Apakah naskah rancangan perda tersebut dapat disetujui? Selanjutnya, seluruh anggota DPRD menyatakan setuju.

*Tok!* bunyi palu di ruangan tersebut yang diketuk Luthfi menjadi penanda raperda Perubahan RPJMD 2019-2024 telah resmi disahkan menjadi perda. Luthfi pun berdiri dan melanjutkannya dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama Bupati Cirebon Imron Rosyadi. Dengan begitu, maka regulasi ini siap untuk dimulai.

Setelah resmi menjadi perda, maka tahap terakhir menunggu hasil fasilitasi akhir yang sedang dievaluasi tim Bappeda pemerintah provinsi. Bappelitbangda Kabupaten Cirebon mengaku, saat ini tengah menunggu hasil kajian provinsi yang nantinya dituangkan dalam keputusan Gubernur Jawa Barat.

Seperti diketahui, dalam perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon, Pemkab telah menghimpun 9 isu strategis pembangunan daerah yang menjadi skala prioritas. • **Cak/Muiz**



# Meneropong Capaian Cirebon 2024

Dalam perubahan RPJMD terdapat 9 isu strategis yang menjadi skala prioritas pembangunan. Apa saja?



Sembilan isu strategis yang dicanangkan dalam perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024, berangkat dari isu strategis RPJPD serta bersinergi dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat. Diantaranya: Reformasi Kebijakan dan Pelayanan Publik, Pengangguran dan Kemiskinan, Kualitas Sumberdaya Manusia dan Nilai-Nilai Kehidupan Masyarakat.

Selanjutnya, Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi, Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan, Keamanan, Keterlibatan dan Ketentraman Ma-

syrakat, Penyediaan dan Kemanfaatan Infrastruktur Wilayah, Penanganan Pandemi Covid 19 dan Dampaknya serta Komitmen Penyelenggaraan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

### Reformasi Pelayanan Publik

Isu reformasi pelayanan publik dianggap penting karena dirasa kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah. Selain itu rendahnya profesionalisme aparatur dan minimnya sarana yang

memadai dalam mendukung kinerja birokrasi menjadi alasan pembenahan ini dibutuhkan.

Reformasi birokrasi mencakup pembenahan struktural, prosedural, kultural dan etika birokrasi. Terdapat 3 elemen yang melekat. Pertama, reformasi keuangan daerah berfokus pada mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas.

Kedua, reformasi sumberdaya aparatur daerah, yakni mengenai kualitas implementasi dari sebuah program kerja dan



memusatkan perhatian kepada kesiapan sumberdaya manusia. Ketiga reformasi pelayanan publik yang baik sebagai hasil dari reformasi keuangan dan sumberdaya aparatur.

Dalam pembenahan struktur dan alokasi sumber daya aparatur perlu dilakukan telaah dan evaluasi terhadap keberadaan struktur organisasi, beban kerja masing-masing. Sehingga diharapkan memperoleh hasil penempatan SDM sesuai keahlian, kompetensi dan beban kerja pada struktur jabatan yang dilaksanakan.

Secara umum, isu reformasi birokrasi dan pelayanan publik bertujuan menjawab berbagai persoalan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Di antaranya: menciptakan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi; menata kelembagaan dan menempatkan birokrasi sesuai kapasitas; meningkatkan kualitas layanan publik; membangun iklim birokrasi yang integral dengan kebudayaan lokal.

### Pengangguran dan Kemiskinan

Kedua mengenai pengangguran dan kemiskinan. Meski

angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon terus mengalami penurunan secara signifikan dalam lima tahun belakangan hingga menembus 9,94 % pada 2019. Namun bukan berarti persoalan kemiskinan sudah tidak krusial lagi. Kemiskinan dan ketenagakerjaan menjadi permasalahan yang serius dan saling integral.

Persoalannya, dikarenakan terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan di sektor formal dibanding jumlah pengangguran terbuka. Hal itu juga disebabkan rendahnya kemampuan kewirausahaan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Sehingga penyelesaian masalah kemiskinan dan pengangguran tidak bisa dilakukan secara parsial melainkan komprehensif dan membutuhkan daya dukung besar.

Oleh karena itu, setidaknya ada beberapa substansi yang akan menjadi fokus perhatian isu ini di antaranya: peningkatan keterampilan dan kemampuan wirausaha berbasis lokal, baik desa maupun komunitas dengan membangun balai latihan kerja (BLK) dan BLK Komunitas. Kemudian membuka akses mo-

dal, sarana prasarana dan pasar bagi pelaku UMKM.

### Kualitas SDM dan Nilai-Nilai Kehidupan Masyarakat

Isu SDM dan nilai-nilai kehidupan masyarakat mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, ketakwaan, hingga budaya. Ada banyak tugas berat Pemkab Cirebon untuk menyelesaikan tantangan yang ada di bidang ini. Sehingga prosesnya pun dimulai dari pembekalan pengetahuan hingga menata sikap dan perilaku.

Pada isu ini ada upaya internalisasi nilai-nilai kebaikan ke dalam masyarakat sehingga tercipta relasi yang harmonis, toleransi dan saling menghormati, kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan, menciptakan lingkungan yang kondusif, aman dan tenteram serta menciptakan SDM yang berkualitas.

### Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Isu yang tak kalah penting dalam perubahan RPJMD memuat sektor perekonomian yang dapat diukur dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon sejak 2016 menurun signifikan. Hingga 2019 angkanya mencapai 4,86%. Belum lagi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) di Jawa Barat dan Indonesia, maka LPE Kabupaten Cirebon pada kurun waktu 2017-2019 pun selalu di bawah rerata.

### Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Kabupaten Cirebon memiliki 412 desa, dimana setiap desa memiliki kekayaan sumberdaya



yang dapat dimanfaatkan dalam rangka penguatan pembangunan desa. Desa saat ini memiliki kesempatan untuk merencanakan pembangunan berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada di desa.

Oleh karenanya, Pemkab Cirebon akan mengambil pendekatan yang dapat diambil dalam pembangunan desa dan kawasan perdesaan melalui pengembangan ekonomi lokal (PEL). Melalui pendekatan PEL diharapkan dapat berkontribusi pada penyelesaian kemiskinan dan pengangguran yang sampai saat ini masih menjadi beban berat.

**Keamanan, Ketertiban Masyarakat**

Keenam, Pemkab Cirebon bertekad memberikan rasa aman dan nyaman serta ketenteraman. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Cirebon memiliki citra sebagai kota wali. Akan tetapi kawasan atau daerah rawan penyakit masyarakat berkembang sangat pesat. Kenyataan ini memberikan keresahan terhadap masyarakat yang bermukim di Kabupaten Cirebon.

Sehingga untuk mengembangkan citra positif perlu diperkuat dengan penegakan Perda dan Perkada untuk mengoptimalkan cakupan pengawasan terhadap daerah rawan penyakit.

**Penyediaan Infrastruktur Wilayah**

Salah satu indikator mengukur kemajuan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah tersedianya infrastruktur yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Infrastruktur memiliki peran strategis dalam peningkatan kewilayahan, distribusi barang dan mobilitas.

Untuk mendukung peran tersebut, Pemkab Cirebon berupaya mengembangkan sistem prasarana jalan dan jembatan yang diarahkan pada lima Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang tertera dalam RTRW Kabupaten Cirebon yaitu, PKL Sumber, Ciledug, Lemahabang, Palimanan dan Arjawinangun.

Infrastruktur wilayah meliputi transportasi, sumber daya air, irigasi, listrik, telepon, dan sarana penting lainnya. Tujuan-

nya dapat menarik para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Cirebon.

**Penanganan Pandemi Covid 19 dan Dampaknya**

Sejak ditetapkannya sebagai pandemi nasional, kasus positif di Kabupaten Cirebon memperlihatkan peningkatan dan penyebaran yang semakin meluas. Akibatnya telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor. Termasuk dalam pelaksanaan dan pembangunan daerah tahun 2020 yang *terefocusing* dan realokasi anggaran.

Perkembangan Covid 19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target, tujuan dan sasaran indikator kinerja makro. Selain itu perlunya ditetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah sebagai upaya pemulihannya.

**Pembangunan Berwawasan Lingkungan**

Terakhir perubahan RPJMD juga membawa isu komitmen penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Beberapa persoalan lingkungan yang berasal dari kegiatan pembangunan di Kabupaten Cirebon seperti alih fungsi lahan dan hutan, kelangkaan air baku, penggunaan pupuk dan tindakan pembuangan bekas tambang.

Ancaman pencemaran lingkungan ini, Pemkab Cirebon berencana menyelesaikan secepatnya agar tidak berimbas pada dampak lain seperti banjir, longsor, kehilangan ekosistem dan musibah kebakaran lahan. Beberapa wilayah di bagian timur dan selatan di Cirebon perlu mendapat perhatian serius.

# Indikator Keberhasilan Kinerja 2024

Dalam menentukan keberhasilan sembilan isu strategis dalam perubahan RPJMD. Ada indikator yang menjadi target kinerja perangkat daerah. Seperti apa?



Dari sembilan isu strategis yang dicanangkan pada perubahan RPJMD, setidaknya diejawantahkan dalam program perangkat daerah sebagai instrumen mencapai sasaran. Perencanaan program perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi misi bupati,

berbasis permasalahan pembangunan termasuk penanganan pandemi, pencapaian SDGs hingga peningkatan pendapatan masyarakat.

Program perangkat daerah dari tahun 2020 hingga 2024, disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur

program sebagaimana diatur mutakhir dalam Permendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Rinciannya, ada pada kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024.

Pertama mengenai urusan pe-





merintahan pelayanan dasar. Disdik Kabupaten Cirebon memiliki program penunjang urusan pemerintah daerah dengan indikator peningkatan kualitas, efisiensi dalam penyusunan laporan perencanaan. Dimana kondisi awal 78,26 persen dan beranjak 78,3 pada 2020. Setelahnya 78,4 tahun 2022 dan 78,45 pada 2023 hingga mencapai kondisi akhir pada 2024 dengan 78,5 persen.

Selain itu, ada program pengelolaan pendidikan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SD, SMP dan SMA dengan kondisi semula hanya 67 persen. Dan naik satu persen pada 2020. Dinas pendidikan berencana mengujarnya pada 2021 dengan nilai 68, 41 persen, 68, 82 persen pada selanjutnya. Hingga mencapai kondisi akhir pada 2024 nanti dengan skor 69,65 persen.

Sementara mengenai urusan bidang kesehatan terdapat program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat. Dinkes Kabupaten Cirebon berencana menurunkan angka kematian ibu dari kondisi 85 pada tahun 2020. Dengan target 83,5 di 2021 dan mencapai kondisi akhir 79 pada 2024 nanti.

Selain itu Dinkes Kabupaten Cirebon berupaya meningkatkan capaian *Universal Health Coverage (UHC)* dari kondisi 97 persen pada 2020 dan 97,5 pada 2021 dan sempat turun menjadi 95. Mereka pun menargetkan pada kondisi akhir 100 persen.

Kedua mengenai urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, terdapat program pengembangan perumahan dengan indikator prosentase lingkungan permukiman yang tertata. Dari

kondisi awal 96,5 persen yang turun menjadi 89,89 pada 2020. Dinas PUPR Kabupaten Cirebon pun berencana menaikannya pada 2021 di angka 92,42 hingga target akhir 100 persen pada 2024.

Ada pula program perumahan dan kawasan permukiman kumuh, peningkatan prasarana dan utilitas umum serta peningkatan sertifikasi dan klasifikasi perumahan dan kawasan permukiman.

Sedangkan dalam urusan bidang pertanahan, ada program penyelesaian sengketa tanah garapan yang akan mengatur penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan. Dari prosentase awal pada 2020 di angka 44,12. Dinas PUPR menargetkan capaiannya pada 2021 di angka 50,35 dan pada 2022 di angka 56,57 dan kondisi akhir 69,03 persen.



Selanjutnya program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator prosentase peningkatan pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal. Kedua, program penunjang urusan pemerintahan dengan meningkatnya pelayanan administrasi per Kantoran sesuai standar pelayanan prima.

Ketiga dalam urusan pemerintahan bidang sosial, ada program pemberdayaan sosial di antaranya peningkatan jumlah panti asuhan, rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial. Selain itu, ada target penurunan jumlah PPKS dari kondisi awal 244.832 jiwa. Dengan target 1385 PPKS pada tahun 2020 dan 1200 pada tahun 2021. Hingga pada kondisi akhir penurunan yang mencapai 6.860.

Sementara dalam urusan pe-

merintahan bidang tenaga kerja sebagai respon tingkat pengangguran yang tinggi, ada program pelatihan kerja dan produktivitas kerja hingga penempatan tenaga kerja oleh Disnakertrans Kabupaten Cirebon. Indikatornya dihasilkan dari prosentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam dan luar negeri.

Kemudian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dicanangkan dalam indikator prosentase peningkatan pada perlindungan bagi perempuan.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga memiliki program yang memberi kemudahan pelayanan usaha izin usaha simpan pinjam. Dengan indikator peningkatan kelembagaan koperasi, laju perkembangan usaha produktif koperasi. Selain itu ada pula program pem-

berdayaan sektor UMKM dengan indikator persentase UMKM yang berkembang nilai produksi dan omzetnya.

Tak kalah pula Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon yang mengejar program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dengan indikator peningkatan pada produksi komoditas tanaman pangan, produksi peternakan, komoditas perkebunan, komoditas hortikultura dan rasio sarana produksi pertanian.

Dari seluruh capaian kinerja perangkat daerah dalam SKPD ada indikator yang memberi gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati Cirebon yang ditetapkan menjadi Indikator Makro dan Indikator Kinerja Umum (IKU).

Indikator Makro, dimulai sebagai respon perkembangan keadaan akibat Covid 19 yang dapat dilihat dari, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari semula 69,83 pada tahun 2021 akan diproyeksikan hingga mencapai 71,59 persen pada 2024 nanti. Selanjutnya pengeluaran per kapita dari semula 10,436 pada 2021 yang meningkat pada 2024 di angka 10,501.

Lalu, indikator dari penurunan persentase penduduk kemiskinan, tingkat pengangguran dan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi.

Sementara IKU Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 dapat diukur dari persentase penambahan budaya daerah yang dilestarikan, penambahan hak kekayaan intelektual, jumlah kelompok kebudayaan aktif, jumlah kunjungan wisatawan, IPM, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, umur harapan hidup, persentase penduduk miskin dan pertumbuhan seluruh sektor PDRB. •Suf

## Ikuti Pelantikan SOTK Baru

Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon mengikuti pelantikan dan sumpah jabatan ASN pada Satuan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru di lingkungan Kabupaten Cirebon.



foto-foto : Quesoy/ik

## Rakor Atasi Kelangkaan Oksigen

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi beserta Forkopimda melakukan rapat koordinasi guna mengantisipasi kelangkaan oksigen saat kasus positif Covid 19 meningkat.



foto-foto : Quesoy/ik

## Amura

## Jamur Crispy Yang Diekspor Hingga Prancis

Jamur crispy ini digoreng dengan memanfaatkan uap minyak. Hasilnya produk ini diminati hingga internasional. Bagaimana bisa?



Foto: foto: Quasy/Id

Selain ditumis, jamur tiram dapat dinikmati dengan digoreng. Namun bagaimana jika digoreng dengan tanpa minyak melainkan hanya uap. Seperti kudapan satu ini bernama Amura yang menghasilkan jamur crispy renyah dan enak.

Amura, merupakan nama produk dari cemilan jamur tiram segar pilihan yang diolah dengan beragam bumbu rempah hingga menjadikannya lezat. Pemiliknya adalah Nia, perempuan lansia asal Desa Playangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon.

Nia bercerita, kalau dulunya ia hanyalah seorang petani jamur. Saat itu, ia bersama kawan sejawatnya berkelakar akan mengolah jamur tiram dengan wujud yang berbeda setelah kerugian yang dialaminya. Pasalnya jamur tiram merupakan komoditas yang memiliki harga musiman. Jika kemarau, harganya bisa sangat mahal. Sebaliknya jika musim penghujan harganya anjlok.

Nia pun memiliki ide untuk menjadikannya cemi-

lan. Tepatnya tahun 2014, ia mulai membuat jamur crispy dengan menggorengnya di atas minyak dan menjualnya. Singkat cerita, usaha itu telah Nia geluti hingga setahun berjalan. Ia pun mulai menyadari jika jamur tiram crispy miliknya tak begitu laku.

"Mungkin karena pengemasannya kurang menarik atau alat gorengnya yang kurang sesuai untuk jamur tiram. Jadi awal-awal hanya laku untuk kalangan sendiri," ujarnya.

Perempuan berusia 61 tahun itu, akhirnya harus memutar otaknya agar usaha itu tetap bisa bertahan. Tahun 2015, Nia mencoba melibatkan beberapa akademisi di antaranya, Prof Anas, Ibu Ina Juniarti dan Pak Priatna dengan membuat gebrakan baru.

"Saya pun memulai *trial* selama 2 tahun, jamur tiram itu diolah tanpa digoreng tetapi dibuat dengan uap minyak. Mesinnya khusus dari Universitas Gadjah Mada (UGM)," katanya menceritakan.

Siapa sangka ternyata pengolahan pada tahun



keduanya itu, Nia berhasil membawa produknya larap. Ia pun menamakan jamur crispy itu Amura. Nia mengaku, Amura sangat berbeda dengan produk jamur lainnya. Amura hanya mengandalkan uap bukan digoreng biasa. Metode ini merupakan salah satu cara agar makanan lebih sehat dan bertahan lama.

"Kalau pembuatannya, kita memang masih menggunakan minyak, namun yang kita ambil uapnya saja. Biasanya kita memerlukan sekitar 80 liter minyak yang kita campur dengan minyak zaitun 4 persen sebagai pengawet agar baunya lebih wangi. Terbukti, masa *expired* bisa bertahan hingga 1 tahun 19

hari," ungkapnya.

Alhasil, kini kudapan Amura telah mengolah sekitar 200 kg dalam sekali produksinya. Ini merupakan sebuah capaian yang fantastis bagi Nia. Ia tak pernah menduga jika Amura akan mampu sebesar ini.

"Saya sangat bersyukur atas keberhasilan yang sudah dicapai, karena ini merupakan jawaban atas usaha saya selama ini," ucapnya.

Amura memiliki berbagai macam kemasan dari mulai terkecil hingga terbesar. Berbagai varian Amura juga tersedia dari rasa rendang, empal gentong sampai mie aceh yang bisa mengoyak lidah para penikmatnya.

Harganya pun ekonomis, untuk satu Amura berukuran 80 gram, dibandrol Rp 15 ribu sementara 250 gram seharga Rp 50 ribu.

Usaha keras Nia selama membangun Amura kini sudah terjawab. Saat ini rumah industri jamur crispy Amura telah memiliki 13 karyawan. Nia juga melibatkan 12 petani untuk memasok jamur tiram.

Sementara untuk omzetnya, Nia bisa meraup hingga Rp 250 juta dalam sebulan. Dari keuntungan itu, ia juga ringan tangan dengan menyalurkannya ke anak yatim hingga dhuafa.

Untuk merasakan jamur crispy Amura, konsumen tak perlu repot datang ke Desa Playangan tempat Amura berasal. Pasalnya kini telah mudah didapatkan di berbagai ritel modern. Terlebih Amura juga merupakan produk binaan Bank Indonesia.

"Kalau di Jakarta Amura sudah tersedia di Sarinah dan Mall Kalibata. Kalau minimarket Indomaret, Yogya dan Surya se Jawa Barat juga telah ada," ungkap Nia.

Saat ini, Nia mengaku tengah mempersiapkan Amura rasa rendang, mie aceh dan empal gentong untuk diekspor ke Perancis setelah mendapat pesanan satu kontainer.

"Itu setara 500 kg Amura, saya dikasih waktu 3 bulan untuk menyelesaikannya. Saya sangat bersyukur atas itu," paparnya.

Meski sudah besar, Nia mengaku tantangan terbesar baginya adalah digitalisasi. Pasalnya teknologi bukan lagi masanya.

"Saya tidak mengkhawatirkan pembuat jamur crispy yang sudah tersebar di mana-mana. Saat ini tantangan besarnya adalah jualan *online*. Karena saya malas untuk begitu, apalagi kan karyawan sudah berumur semua," katanya. •Lan

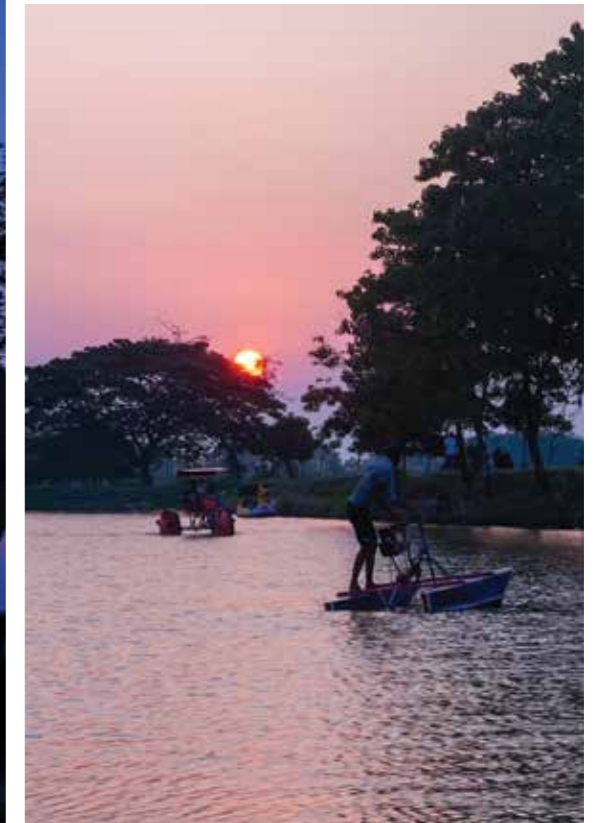
## Lembayung Senja di Embung Wanakaya

Baru empat bulan, Embung Wanakaya ini diresmikan menjadi obyek wisata. Penampungan air yang awalnya hanya untuk mengairi pesawahan, kini selalu ramai pengunjung ketika sore tiba.

Ramainya pengunjung yang datang, membuat warga sekitar berduyun-duyun membuka ladang usaha. Mulai dari kuliner hingga berbagai wahana permainan.

"Hari biasa juga sangat ramai. Kadang kalau bulan puasa, pada ngabuburit di sini. Cuman karena sekarang pandemi, kita batasi," ucap Adang, salah satu pengelola.

Panorama sawah dan indahny gunung Ciremai, memanjakan mata memandang. Apalagi jika dinikmati saat senja datang, keindahannya bisa berkali-lipat. Menjadikannya layak untuk destinasi bersantai. **-Soy**



## Mohammad Ridwan: Jangan Jadi Manusia Rugi

Sejak masih mahasiswa ia selalu terlibat dalam mengawal kebijakan pemerintah. Sosok satu ini merupakan organisatoris ulung. Bagaimana kisahnya?



Laki-laki itu tampak geram, kala mengingat kenangan tahun 1990-an yang pernah ia lalui. Saat itu ia bersama kawan sejawatnya, menuntut pembubaran Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) milik Departemen Sosial Republik Indonesia. SDSB merupakan program penggalangan dana publik berbentuk kupon untuk membantu dunia olahraga pada era orde baru (orba).

Ridwan muda menilai, hal itu sangat bertentangan dengan nilai agama Islam maupun etika sosial karena merupakan praktik lotre yang dilegalkan dengan dalih kas negara. Tempo itu, Ridwan muda memang tak pernah absen mengawal kebijakan orba yang kontra. Berbagai aksi isu selalu ia ikuti. Terlebih ia juga tergabung di organisasi BEM Unisba maupun Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).



“Banyak kesan selama aktif di kedua organisasi itu. Apalagi soal mengawal kebijakan pemerintah. Zaman orba memang banyak persoalan yang mengudara,” kenang Ridwan.

Pemilik nama lengkap Mohammad Ridwan itu berangkat dari aktivis gerakan mahasiswa. Maka tak aneh, prinsip hidupnya selalu ia artikan untuk berjuang menjadi lebih baik.

Saat ini, ia merupakan anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi PKS. Pria kelahiran 17 Agustus 1967 itu, memang sejak kecil belajar untuk tidak menyesali apa yang telah terjadi.

“Karena itu merupakan garis takdir Allah. Baik sedih maupun suka saya hadapi dengan ceria, saya memaknai itu sebagai proses kehidupan yang harus dijalani dengan optimis serta penuh kesabaran,” ucapnya.

Ridwan mengawali pendidikannya di SDN Sumber 2. Kemudian dilanjutkan di Mts Al Ishlah Bobos dan SMA Muhammadiyah Cirebon. Gelar sarjananya, ia tempuh di Unisba Bandung yang lulus tahun 1993. Terakhir ia pun menyelesaikan magisternya di UNIPDU Jombang pada 1999.

Sejak muda, Ridwan telah memiliki hobi ber-

main badminton, tenis meja, bersepeda, membaca serta berinteraksi dengan masyarakat. Kini di usianya yang ke 53 tahun, satu per satu hobi yang berat itu terpaksa harus ia ditinggalkan.

“Saya dulu suka sekali bermain badminton. Meskipun tak pernah mengikuti kejuaraan apapun tapi saya menggeluti dunia itu. Cuman sekarang faktor usia sudah enggak. Sesekali hanya bersepeda atau bermain tenis meja demi menjaga kesehatan tubuh. Kalau melebur bersama masyarakat itu tak pernah saya tinggalkan, karena merupakan wadah pengabdian saya,” jelasnya.

Laki-laki yang lahir di Sumber, Cirebon ini, merupakan tipikal orang yang tegas, ramah santun dan penuh senyum. Ia juga sangat menghargai waktu. Ridwan selalu menanamkan pada dirinya agar menghindari waktu yang tidak bermanfaat karena tak ingin masuk dalam golongan orang merugi.

“Kita harus senantiasa memanfaatkan waktu dengan baik, karena kecenderungan manusia kan sudah sesuai sebagaimana firman Allah, *Innal-insana lafi khusr*. Makanya supaya saya tidak masuk orang merugi, *fa iza faragta fansab*. Namun tetap pada kegiatan yang bernilai positif ya,” terangnya.

Ridwan mengingatkan, jika usia muda tak dimanfaatkan dengan baik, maka hanya melahirkan penyesalan di kemudian hari. Konsistensinya ia buktikan sejak muda hingga sekarang. Ridwan banyak mengikuti kegiatan organisasi.

“Kalau sekarang, saya menjadi ketua di beberapa organisasi seperti, ketua Yayasan Ponpes Al-Muqoddas, ketua Ikatan Pedagang Pasar Sumber, Dosen UMC dan menjadi *owner* Ridho Motor Sumber,” paparnya.

Sementara karir politiknya, ia mulai sejak tahun 2006, Ridwan mulai beranjak menuju organisasi politik. Ia pun bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia tertarik dengan pendekatan filosofis yang menjadi dasar filosofis PKS berdiri.

“Filosofis yang dibangun oleh PKS adalah *khairunnas anfauhum linnas*. Yang penting saya bisa bermanfaat bagi orang lain,” jelasnya.

Berangkat dari pengalamannya sejak muda di organisasi dan hobinya yang mampu menjadi penyambung lidah masyarakat. Tepatnya tahun 2019, atas dasar kepercayaan dan dorongan masyarakat yang mulai terbangun. Ridwan mulai mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

“Alhamdulillah saya terpilih untuk menjadi wakil rakyat. Ini merupakan rezeki dari Allah karena usaha saya selama ini. Saya akan terus berusaha agar bisa menampung seluruh aspirasi masyarakat untuk lebih maju,” katanya. •**Lan**

## Rohayati

# Miliki Trah Marhaenis Nasionalis

Dibesarkan dari keturunan marhaen. Maka tak aneh jika politik dan nasionalisme sudah menjamah kehidupannya sejak kecil. Bagaimana kisahnya?

**T**erlahir dari keluarga nasionalis, menjadikannya sebagai sosok yang berani dan tangguh. Sejak kecil, ia telah tumbuh di tengah kalangan para pejuang kemerdekaan. Tak heran, bila perempuan satu ini tak lagi asing dengan kisah-kisah perjuangan para pahlawan.

Ialah Rohayati, perempuan berdarah marhaenis yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP). Garis keturunan politik keluarganya, menjadi salah satu alasan, Rohayati memilih menjadi legislator.

“Saya memiliki trah politik dari kakek selaku keluarga besar nasionalis marhaen. Lebih tepatnya adik kakek saya bernama Tikok Mochammad Ichlas. Ia adalah tokoh besar dan ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) di Cirebon pada masa awal kemerdekaan,” terangnya.

Bagi Rohayati, politik merupakan sesuatu yang indah dan fleksibel. Tergantung cara orang menerapkannya. Rohayati mengaku, telah merealisasikannya melalui tupoksinya sebagai anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon yang membidangi perekonomian dan keuangan.

“Melalui ruang lingkup pertanian, saya mengkosrecek dan mengawasi secara langsung penyaluran pupuk subsidi kepada masyarakat. Dan juga mengawasi berbagai pembangunan



infrastruktur pertanian. Tentunya dengan mengharapkan hasil yang optimal agar memperkuat ketahanan pangan suatu wilayah,” jelas Rohayati.

Sebagai keturunan kaum marhaen, Rohayati memiliki motivasi yang gigih dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. Seperti nilai-nilai yang diterapkan dalam kalangan marhaenis untuk senantiasa memperhatikan *wong cilik* dan mengedepankan gotong royong.

Sebelum berkecimpung di gelanggang politik, Rohayati terlebih dulu terlibat aktif dalam organisasi perempuan dengan menjabat sebagai sekretaris Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Pasalakan.

Barulah pada tahun 2009, ia mulai meniti karir politiknya dengan menjadi pengurus di ranting PDIP Kelurahan Pasalakan sebagai sekretaris. Pengalamannya selama lima tahun di ranting, ia teruskan hingga

tingkat PAC PDIP Kecamatan Sumber. Rohayati pun menjabat sebagai wakil ketua PAC hingga tahun 2019.

“Saat masih menjabat wakil ketua di PAC, saya didorong teman-teman dan suami untuk maju mencalonkan diri sebagai dewan. Salah satunya karena untuk memenuhi keterwakilan perempuan di kursi DPRD,” ucapnya menerangkan.

Tepatnya tahun 2017, Rohayati akhirnya terpilih sebagai pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Cirebon setelah menggantikan posisi Agus Setiawan yang saat itu mengundurkan diri pada periode 2014-2019. Karena komitmen dan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya, Rohayati pun berhasil terpilih kembali pada periode selanjutnya hingga sekarang.

“Alhamdulillah, saya bisa jadi seperti ini ya seperti air mengalir saja, tidak dipaksakan dan tidak

memaksakan. Dan kuncinya, jalani berbagai proses dengan ikhlas dan sabar. Kalau sudah ikhlas dan sabar pasti akan membuahkan hasil,” ujarnya.

Perempuan kelahiran Jakarta 1976 satu ini, juga dikenal cerdas dan lugas dalam memberikan berbagai *statement*. Terlebih, mengenai nasionalisme sebagaimana latar belakang dirinya. Bagi Rohayati, nasionalisme adalah paham yang netral dan suatu ajaran agar dapat menerima semua kalangan yang baik.

“Nasionalisme mengajarkan kita untuk bebas bergaul, dalam arti, menerima semua ajaran tanpa membeda-bedakan suatu golongan atau ras dari mana seseorang berasal. Begitu pula dalam lingkup agama, nasionalisme akan menerima semua agama yang ada di Indonesia,” katanya.

Di tengah kesibukannya sebagai wakil rakyat, Rohayati tak melupakan jati dirinya sebagai sosok seorang ibu yang fasih dalam mengurus rumah tangga dan ketiga anaknya. Meski tugas-tugasnya sebagai anggota dewan adalah suatu kewajiban untuk segera dilaksanakan.

“Kalau kegiatan dewan sudah selesai semua, saya kembali ke aktivitas sehari-hari yaitu menjadi ibu rumah tangga,” ucapnya.

Seperti perempuan pada umumnya, setelah berjibaku dengan berbagai kesibukannya. Rohayati, kerap mengabdikan waktu rehatnya dengan meluangkan waktu untuk melakukan hobi yang ia sukai.

“Kalau sebelum pandemi saya menghabiskan hari libur dengan kegiatan bersantai dengan keluarga seperti ber-jalan-jalan, merawat diri maupun SPA,” pungkasnya. •Sar

# Seminar Investasi Upaya Membuka Industrialisasi

Dalam upaya menumbuhkan ekonomi daerah. Forkopimda bahas rencana investasi dalam seminar saber. Bagaimana isinya?



foto-foto: Quasy/da

Siang itu, seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cirebon menghadiri kegiatan seminar bertajuk 'Saber Investasi Sebagai Penggerak Pertumbuhan Investasi di Kabupaten Cirebon'. Mereka mendiskusikan, sejauh mana kesiapan dan kebutuhan Kabupaten Cirebon dalam menjadi kawasan industri.

Bupati Cirebon Imron Rosyadi menilai, jika Kabupaten Cirebon memiliki banyak potensi menjadi kawasan investasi yang besar. Namun ia mengakui perlu tindakan pemerintah daerah (Pemda) menyiapkan alur birokrasi yang mudah untuk mem-

buka kran investasi bagi para investor.

"Kalau secara fasilitas dan potensi itu kita sudah ada. Kalau sekarang kami sedang membenah perizinan agar tidak sampai mempersulit investor. Kami membuka lebar kepada investor yang ingin menanamkan modal dan mengembangkan produknya di Kabupaten Cirebon," katanya.

Salah satu langkahnya, ia tanyakan dalam rencana pembangunan wilayah timur Cirebon yang akan menjadi proyeksi kawasan industri. Imron mengaku peraturan daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah dipetakan. Ia ber-

harap kebijakan ini, akan mempermudah pembangunan dan percepatan investasi.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi, juga memberikan pandangannya mengenai rencana jangka panjang Kabupaten Cirebon yang akan memasifkan pembangunan infrastruktur dalam sektor industri. Ia pun sangat mendukung rencana strategis itu. Namun sebelum itu, ada hal yang mesti dibenahi oleh Pemda.

"Kita masih memerlukan beberapa revisi terutama kebijakan RTRW yang ada di Kabupaten Cirebon, agar seluruh hambatan yang berkaitan dengan struk-



tur ruang bisa kita mulai. Kami sangat yakin tiga tahun kedepan Kabupaten Cirebon akan lebih baik," jelasnya.

Selain menyiapkan rencana strategis mengenai teknis di lapangan, kata Luthfi, maka tahap selanjutnya perlu mengoptimalkan aturan RTRW yang mengatur kepemilikan lahan agar bisa menjadi magnet bagi para investor.

Luthfi juga mengatakan, jika Kabupaten Cirebon memiliki potensi kekayaan laut dan perikanan, yang mampu menambah optimisme dalam membangun pertumbuhan ekonomi. Ia sangat berharap kalau kedepan, Kabu-

paten Cirebon akan bisa menjadi yang terdepan di Jawa Barat.

"Kita punya pantai dari ujung Kapetakan sampai ujung Losari. Saya berharap Kabupaten Cirebon bisa berbicara banyak di bidang pengembangan potensi industri yang berbasis lautan dan perikanan ini. Kami berharap, nantinya bisa mendongkrak PDRB Kabupaten Cirebon, agar bisa mengubah wajah Kabupaten Cirebon yang tadinya berada di belakang menjadi yang terdepan," harapnya.

Sementara itu, Kapolresta Cirebon Arif Budiman juga sangat mendukung rencana Pemkab Cirebon dalam membuka

kran investasi seluas-luasnya. Ia berjanji, seluruh jajarannya akan bertugas dengan semaksimal mungkin dalam menjaga kondusifitas keamanan. Hal ini sebagaimana tertuang melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satgas Percepatan Investasi dan Tim pelaksana Satgas.

"Kondusifitas keamanan juga menjadi faktor penentu bagaimana kemudian sebuah investasi bisa berjalan. Yang dapat terjamin dari mulai proses persiapan, konstruksi, produksi sampai dengan pengembangan. Kalau seluruh komponen dan *stakeholder* yang ada di Kabupaten Cirebon memiliki visi yang sama untuk menerapkan itu, maka akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa," ungkapnya.

Letkol Sugir, dari Dandim 0620 Kabupaten Cirebon juga mengafirmasi apa yang disampaikan Arif. Namun ia lebih menekankan pentingnya memahami kondisi sosial yang terjadi di masyarakat. Palsanya, mewujudkan pertahanan di wilayah darat juga dipengaruhi oleh kondisi sosial yang ada.

Oleh karena itu, Sugir berpendapat, segala harapan dan gagasan yang akan dilaksanakan oleh Pemkab Cirebon, harus mampu dipahami oleh seluruh elemen masyarakat agar tak terjadi miskomunikasi.

"Kami dari TNI mendukung penuh Pemkab Cirebon untuk menciptakan situasi dan kondisi yang dinamis. Karena industrialisasi akan memberi kemudahan sebagai sarana atau fasilitas hidup bagi masyarakat. Namun harus sefrekuensi. Masyarakat pun harus memiliki hidup yang tenang tanpa ada rasa khawatir mereka terancam," pungkasnya.

•Lan

# Kaji Perubahan Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak

Perda Nomor 1 Tahun 2018 dirasa perlu dirubah karena belum mengatur secara lengkap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Bapemperda pun berbegas mengkajinya. Bagaimana hasilnya?



foto-foto: Quasy/ik

Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak butuh kajian lebih mendalam. Pasalnya perda ini belum memberikan perlindungan yang utuh terhadap perempuan dan anak. Akibatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Cirebon masih tergolong tinggi.

Laporan Women Crisis Center (WCC) Mawar Balqis misalnya, tercatat jumlah kekerasan pada perempuan dan anak pada dua tahun lalu yang didominasi kekerasan seksual. Disusul kasus kejahatan KDRT dan *trafficking*. Rin-

ciannya, kekerasan seksual mencapai 90 kasus, KDRT sebanyak 48, sementara *trafficking* 2 kasus.

“Kekerasan terhadap perempuan dan anak didominasi oleh pelajar berusia SLTP sampai SLTA,” ujar Sa’adah, Manager WCC Mawar Balqis.

Sa’adah menerangkan, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dipengaruhi beberapa faktor. Dari masih tingginya sistem patriarki di Indonesia, masih banyak ketimpangan relasi yang terjadi di masyarakat, serta terbatasnya akses dan informasi bagi perempuan dan anak terkait hak-hak dasarnya.

Selain itu, implementasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang belum terealisasi dengan baik. Lalu secara tidak sadar masyarakat masih memberikan ruang dan celah bagi pelaku mengulang kembali tindakan yang dilakukan terhadap korban. Terakhir, nilai tawar seorang perempuan masih dianggap rendah di mata masyarakat.

Karena itu, DPRD Kabupaten Cirebon pun merespon melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk membahas rancangan perubahan perda.

Setelah mengkaji perda tersebut, Bapemperda menilai perlu



dilakukan beberapa perubahan di dalamnya. Pertama, pergantian nama perda dari semula ‘Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak’ menjadi ‘Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak’. Termasuk nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau dinas yang menaunginya.

Kedua, perubahan nomenklatur pada kementerian, sehingga menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bapemperda juga menilai, perlunya penambahan undang-undang sebagai landasan yuridis hukum Perda Nomor 1 Tahun 2018 dibentuk. Pertama, penyisipan landasan UUD 1945 Pasal 28A sampai Pasal 28J dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang

mengatur hak asasi manusia.

Kedua, penambahan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.

Ketiga, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan.

Selain itu, Bapemperda juga menilai, perlu penambahan rumusan istilah dalam ketentuan umum yaitu istilah pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengarusutamaan gender, dan lain-lain yang belum diatur di dalam perda.

Bapemperda juga memberikan masukan, perlunya penam-

bahan bab dan pasal-pasal yang mengatur hak-hak perempuan dan anak secara lebih rinci. Seperti; peningkatan kualitas hidup perempuan yang meliputi peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.

Terakhir, Bapemperda juga menginginkan dalam Perda terdapat aturan untuk diadakannya rehabilitasi kesehatan dan sosial bagi perempuan korban tindak kekerasan dan lain sebagainya. Pasalnya, saat ini belum tercantum dalam Perda Nomor 1 tahun 2018.

Akhirnya jika perubahan perda inisiatif DPRD ini disahkan, akan berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan. Pertama, membatasi perilaku masyarakat yang diskriminatif, kekerasan, eksploitasi, dan kejahatan lainnya terhadap perempuan dan anak.

Kedua, menuntut kesadaran hukum masyarakat untuk memahami jalur hukum yang disediakan dan alur penyelesaiannya berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ketiga, menuntut pemda untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Keempat, menuntut pemda untuk mengadakan sosialisasi dan konsultasi publik guna meningkatkan kesadaran hukum berkaitan dengan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Terakhir, pengalokasian anggaran yang memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon agar membentuk organisasi yang diperlukan maupun membiayai program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. •Muiz



# Sepakati Perda Perubahan Ketertiban Umum

Berbagai klausul dan penambah ayat baru pada perda ketertiban umum telah ditambahkan untuk mengatur ketertiban di masa pandemi Covid 19. Bagaimana isinya?



foto-foto: Quasoy/dk

Siang itu, DPRD Kabupaten Cirebon menggelar paripurna guna menyetujui perubahan rancangan peraturan daerah (raperda) Nomor 7 tahun 2015 mengenai Ketertiban Umum.

Perubahan perda ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid 19 sebagai bencana nasional. Pada Keppres tersebut, terdapat klausul yang mengatur pemerintah daerah harus aktif dalam penanganan dan pengendalian penyebaran pandemi.

Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Cirebon perlu mengatur tata tertib kehidupan ber-

masyarakat di masa pandemi. "Untuk itu kami menghantarkan raperda perubahan ini untuk disahkan," jelas Ayu, Wakil Bupati Cirebon, pada saat hantaran pengesahan.

Wakil Ketua Pansus H Darusa, yang ditugasi membahas perda mengatakan, perubahan perda ini telah melalui kajian-kajian dan analisis perbandingan dengan daerah lain. Selain itu, pembahasannya pun telah melibatkan SKPD dan instansi yang menaunginya seperti kejaksaan negeri, TNI, Polri serta tim raperda pemerintah daerah.

Pansus telah bersepakat, untuk mengesahkan raperda menjadi perda pada paripurna

kali ini. Darusa pun mengungkapkan, hasil pembahasan dan penyempurnaan oleh tim pansus. Pertama penambahan pada Bab III pasal 3 mengenai ruang lingkup yang ditambahkan satu poin, 'tertib keadaan bencana non alam pandemi Covid 19'.

Sementara dalam ketentuan pasal 26 Bab III, diubah sehingga ditambahkan beberapa ayat. Ayat satu, 'penyelenggaraan tertib bencana non alam pandemi Covid 19 dilaksanakan oleh satuan tugas Covid 19'. Ayat dua, 'dalam menyelenggarakan penertiban, bupati dapat melakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Jika dirasa dapat menimbulkan ancaman terhadap



masyarakat dan perekonomian'.

Selanjutnya penambahan Ayat tiga, 'pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan setelah adanya penetapan status darurat bencana sesuai ketentuan perundang-undangan'. Ayat lima, 'pembatasan kegiatan masyarakat sesuai pasal dua ditetapkan dengan keputusan bupati setelah dibahas dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)'.

Ayat lima, yang berbunyi, 'pembatasan tersebut harus mempertimbangkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat mengenai aktivitas perekonomian sesuai protokol kesehatan'.

Selanjutnya, Darusa juga menyampaikan pada ketentuan Bab III Pasal 27, yang diubah sehingga berbunyi 'Ayat satu huruf a, 'dalam rangka penerapan di-

siplin pencegahan pengendalian Covid 19, setiap orang wajib menggunakan masker sesuai protokol kesehatan'.

"Hal itu dilakukan apabila beraktifitas di luar rumah, di ruang publik dan bertemu dengan orang lain," jelas Darusa.

Kemudian pada huruf b, 'menghindari kerumunan kecuali menerapkan protokol kesehatan sebagaimana yang sudah diatur pemerintah. Huruf c, 'mentaati perintah isolasi mandiri, setelah ditetapkan oleh pihak yang berwenang'. Huruf d, 'mentaati pemerintah untuk melakukan vaksinasi, kecuali dinyatakan tidak diperbolehkan karena pertimbangan medis'.

Sementara itu, penjelasan dalam ayat 2 pasal 27 ditunjukkan kepada pengelola usaha perdagangan barang dan jasa. Darusa

menjelaskan, bahwa pada ayat kedua ini, mewajibkan para pengusaha untuk menerapkan protokol kesehatan. Pengusaha juga wajib memfasilitasi karyawan agar melakukan vaksin mandiri.

"Ketentuan ini selanjutnya akan diatur melalui peraturan bupati," jelasnya melaporkan.

Penambahan juga terjadi pasal 35, sehingga berbunyi, ayat (2) setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 27 ayat 1 dan 2 dikenakan sanksi administratif atau sanksi sosial. Pasal 35 ayat (3) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa teguran lisan, hingga denda administrasi. Ayat (4) sanksi administratif yang dimaksud pada ayat 3 dapat dikenakan secara berjenjang ataupun tidak berjenjang.

Pada Ayat lima Darusa menjelaskan, penerapan sanksi administratif pada ayat 3 diselenggarakan dengan memperhatikan perlindungan kesehatan masyarakat, tidak mendiskriminasi, kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi sebagai kepentingan pencegahan penyebaran Covid 19.

Sedangkan pada pasal 36, juga menjelaskan besaran denda administratif yang mengalami perubahan sehingga berbunyi. Ayat (1) besaran denda administratif sebagaimana dijelaskan pada pasal 25 dengan ketentuan paling banyak Rp 250.000 untuk perorangan dan Rp 500.000 untuk pelaku usaha yang tidak berbadan hukum.

Dengan disahkannya perda ini, DPRD Kabupaten Cirebon melalui wakil pansus berharap, pemerintah Kabupaten Cirebon, untuk segera mungkin menyusun peraturan bupati sebagai hierarki turunannya dan pelaksanaan teknisnya. •Soy

# Tujuh Catatan Realisasi APBD 2020

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon memberi beberapa catatan terhadap realisasi APBD tahun 2020 lalu. Apa saja?



foto-foto: Quoy/ik

DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat paripurna dalam rangka menyetujui pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020. Agenda ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi yang dihadiri 33 anggota, Bupati, serta jajaran SKPD.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194 Ayat 1. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dilampiri laporan keuangan yang

telah diperiksa oleh BPK.

Rangkaian rapat paripurna tersebut, diawali dengan penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada tahun lalu. Berdasarkan hasil laporan, DPRD menilai, secara umum SKPD masih belum maksimal dalam realisasinya.

"Masih banyak program dan kegiatan yang belum terealisasi karena banyak anggaran ya untuk penanggulangan korban pandemi Covid 19," jelas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Teguh Rusiana Merdeka.

Setelah itu, ada beberapa

point yang menjadi catatan dan rekomendasi Banggar dalam realisasi APBD 2020. Pertama, dari total APBD sebesar Rp 3,7 triliun baru terealisasi anggaran belanja daerah sebesar Rp 3,6 triliun dan pembiayaan daerah Rp 288 miliar. Sehingga, terdapat silpa Rp 365 miliar, yang terdiri dari saldo dana Rp 131 miliar dan hasil penggunaan APBD Rp 234 miliar.

Banggar pun meminta pemanfaatan silpa tahun anggaran 2020 dapat dioptimalkan. Terutama untuk menyentuh program-program yang berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, perolehan pendapa-



tan asli daerah secara totalitas dari target anggaran yang telah ditetapkan mencapai 19,13 persen. Artinya, jika diperhatikan dari realisasi penerimaan pendapatan daerah masih ada beberapa jenis pendapatan yang perolehannya di bawah 100 persen. Seperti pajak reklame, retribusi jangka umum dan jangka utama.

"Namun demikian, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Cirebon yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Cirebon meski di tengah pandemi," kata Teguh.

Selanjutnya, Banggar merekomendasikan, mengenai kebijakan pada tahun 2022 nanti

harus dibuat berdasarkan skala prioritas. Hal tersebut penting dilakukan sebagai upaya menggenjot perencanaan anggaran yang matang. Terlebih, agar perencanaan yang tertuang dalam RPJMD bisa dilakukan dengan baik dan terukur.

"Oleh karena itu, pemerintah terlebih dulu harus bisa membedakan mana yang harus diprioritaskan dan mana yang bisa dijalankan *step by step*," ujar Teguh.

Ia menilai, perencanaan penganggaran yang matang tersebut, akan mendulang PAD secara lebih baik. Jika sebelumnya PAD Kabupaten Cirebon berada di angka Rp 200 hingga 250 miliar, Banggar berharap PAD pada

2022 nanti, bisa mencapai angka Rp 500 miliar.

Teguh juga mengingatkan, angka tersebut merupakan target besar bagi Kabupaten Cirebon. Karena, targetnya mencapai 100 persen dibandingkan PAD tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, dibutuhkan kerja keras dari semua unsur yang berawal dari perencanaan penganggaran secara matang.

Sementara dalam persoalan penanganan sampah, Banggar juga mendesak penyediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ramah lingkungan. Selain itu, sistem pengangkutan sampah juga harus dikelola dengan baik melalui penyediaan kontainer dan truk sesuai dengan kebutuhan.

Banggar juga menyarankan, dalam penanganan banjir dan genangan air akibat drainase yang tidak berfungsi agar bisa dientaskan secepatnya. Khususnya, di wilayah Kecamatan Gunung Jati, Waled, Susukan, serta wilayah timur seperti Pabelan dan Losari.

Sementara dalam menunjang pembangunan dan pengembangan proyek-proyek strategis di Kabupaten Cirebon, ada empat hal yang harus diperhatikan. Yaitu, pengembangan kawasan industri bagian wilayah Cirebon timur, pengembangan kawasan wisata, pembangunan sistem sumber daya air seperti waduk dan revitalisasi irigasi, serta pembangunan infrastruktur jalan yang layak.

"Terakhir, mengenai dampak pandemi Covid 19, Banggar merekomendasikan penanggulangan dampak ekonomi melalui pengembangan ekonomi kreatif. Seperti pengembangan UMKM dan sumber daya manusia berbasis *entrepreneurship*," pungkas Teguh. •Sar

## Kampung Domba

# Hadirkan Edukasi dan Pemberdayaan Warga

Sebuah peternakan domba ini telah memberdayakan masyarakat sekitar. Juga memikat hati warga untuk berkunjung. Mau tahu tempatnya dimana?



Foto: foto : Quasy/ik

Sebanyak tujuh pemuda sukses membangun desa melalui usaha mandiri peternakan domba. Mereka pun telah memberdayakan masyarakat sekitar untuk ikut serta bekerja. Lambat laun, Mereka menamakannya 'Kampung Domba'.

Kampung Domba terletak di Desa Sindang Jawa, Dukupuntang, yang berdiri sejak 2016 silam. Bagi Yuandi, pengelola Kampung Domba mengatakan, awalnya ia dan teman-teman berinisiatif iuran bersama untuk membeli sepuluh ekor kambing yang akan dikembangkan.

"Dengan bermodalkan uang Rp 18 juta itu, kami membeli 10 kambing untuk pengembangbiakan," ujarnya.

Begi juga menceritakan, mulanya ia dan teman-teman hanya mengelola secara mandiri. Setelah berkembang, barulah mereka mengajak para warga setempat untuk turut membantunya.

"Setelah mulai berkembangbiak, kami titip indukan ke warga yang juga memiliki ternak kam-

bing. Hasilnya dibagi dua ke pemilik kandang tersebut," ungkapnya.

Selain membantu proses pengeembangbiakan, warga sekitar juga membantu memasak ketika ada pesanan Aqiqah. Sistemnya bagi hasil dengan prosentase 60 persen untuk warga dan 40 persen kelompok.

"Meskipun belum bisa mengajak masyarakat banyak, minimal bisnis kami telah menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 14 orang," ungkapnya.

Domba-domba yang telah dewasa itu kemudian dijual bagi siapapun yang meminatnya. Begi mengaku, telah menjualnya hingga luar daerah seperti Kuningan, Indramayu dan Brebes. Begi mematok harga mulai dari Rp 1 Juta hingga Rp 6 juta rupiah per ekor. Tergantung jenis dan ukurannya.

"Kadang kalau waktu idul adha, kita buka stan penjualan hewan kurban dan bisa laku hingga ratusan ekor. Tapi hari-hari biasa warga membeli kambing di kampung domba ini untuk kebutuhan



Aqiqah saja," ungkapnya.

Begi berharap, bisnis usaha yang dirintis memotivasi warga lain untuk bisa mengembangkan potensi desanya. "Tidak perlu bekerja di luar kota, kalau bisa menghasilkan di tempat sendiri. Asal punya keinginan, pasti bisa," jelasnya yakin.

Begi juga mengaku, kalau kampung dombanya itu ramai dikunjungi anak-anak. Karena mampu menghibur dan mengedukasi bagi anak-anak. "Banyak juga anak-anak sekolah TK bersama guru-guru main ke kampung domba ini," tutur Begi.

Ramainya pengunjung ke kampung domba tersebut, berpotensi besar dijadikan sebagai wisata edukasi. Untuk memikat

hati para pengunjung, Begi pun sempat memiliki Domba Merino meskipun tidak sampai bertahan lama.

"Kita pernah punya Domba Merino yang kaya serial kartun 'Shoun The Sheep' selama dua tahun. Keberadaannya menjadi daya tarik sendiri untuk anak-anak suka yang suka main ke kandang," ujarnya.

Dikatakan Begi, memelihara Domba Merino tidak semudah merawat domba atau kambing jenis lain. Apalagi cuaca Kabupaten Cirebon yang panas membuat Domba Merino tidak bisa bertahan hidup lama.

"Jadi Domba Merino itu tidak kuat kalau hawanya panas, kaya di Cirebon, jadi ga bisa lama

gitu," jelasnya.

Selain menghadirkan peternakan domba, Begi berencana, akan membuka sekolah alam dan menghadirkan permainan masa lalu yang jarang dilakukan anak-anak zaman sekarang. Pasalnya mereka sekarang lebih sering bermain gawai dibandingkan berinteraksi dengan teman-teman.

Begi meyakini, mimpinya itu satu persatu dapat terwujud. Apalagi pemerintah desa setempat juga mendukung. Bahkan, sampai menawarkan lahan untuk dijadikan wisata kampung domba.

Namun, Begi dan dan teman-teman kelompoknya belum mau mengambil tawaran tersebut, lantaran lokasinya yang dinilai kurang strategis. Akhirnya mereka pun masih menggunakan tempat yang telah ada terlebih dahulu untuk mengembangkan kampung domba.

Meski demikian, agar wisata gratis ini bisa lebih ramai pengunjung, Begi berniat akan membuka lahan yang lebih luas lagi.

"Kami ingin memperluas wilayahnya ke bagian belakang kandang. Lahan milik warga tersebut sudah mendapatkan izin untuk dikelola. Namun belum mulai digarap karena masih terkendala modal," ujarnya.

Untuk lebih mengedukasi masyarakat, Begi dan kelompoknya juga tengah mencari dana tambahan untuk membeli beragam jenis kambing dan domba.

"Kami termotivasi mengenalkan beragam jenis kambing dan domba kepada masyarakat. Karena selama ini banyak masyarakat yang belum mengetahui jenis kambing dan domba. Sehingga menyebutnya 'kambing' saja," pungkasnya, sambil terkekeh. •Soy

## Setu Wetan

# Prioritaskan Program Perangi Sampah

Merespon kondisi TPA Gunung Santri yang *overload*. Pemdes Setu Wetan pun dirikan ruang bakar sampah. Bagaimana konsepnya?



Ratnawati (Kuwu Desa Setu Wetan)

Tingginya volume sampah rumah tangga di Kabupaten Cirebon, yang diangkut menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Santri di Desa Kepuh, Palimanan berdampak pada keberadaannya yang sudah menggunung. Bahkan Pemkab Cirebon memperkirakan usia tampungnya hanya tersisa satu setengah tahun lagi.

Kondisi demikian tak membuat semuanya berpangku tangan. Pemdes Setu Wetan misalnya, mereka terdorong untuk membantu Pemkab Cirebon

dalam ikutserta mengatasinya. Mereka pun mendirikan tempat pembakaran sampah sendiri sebagai solusi mitigasi *overload* TPA Gunung Santri.

Kuwu Desa Setu Wetan Ratnawati mengaku, gerakan mandiri penanganan sampah ini setidaknya menjadi solusi kecil di desa yang ia pimpin.

"Tempat pembakaran sampah ini dibangun dari anggaran dana desa pada tahun 2020, ketika awal saya menjabat lagi sebagai kuwu. Pada periode kedua ini, saya ingin memprioritaskan masalah sampah," paparnya.

Berdirinya tempat pembakaran sampah di Setu Wetan ini, dilatarbelakangi dari kebiasaan buruk warga yang membuang sampah sembarangan. Awalnya terlihat di beberapa titik sempat dijadikan pembuangan sampah liar dari irigasi hingga sungai.

"Namun berkat kerja keras pemdes, kini perilaku warga berubah drastis. Kesadaran warga tentang peduli sampah tumbuh pesat," ungkapnya.

Selain itu, faktor kedua, keberadaan tempat pembakaran sampah bertujuan mengurangi pengangkutan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Desa Setu Wetan. Alhasil DLH hanya mengangkut sampah yang tak bisa dilenyapkan.

Sebelum sampah-sampah di Setu Wetan itu dibakar, sebanyak sepuluh orang berkeliling ke 15 RT menggunakan motor *tosa* untuk mengangkut sampah tiap dua hari sekali. Setelah sampah diangkut mereka pun memilah sesuai jenisnya. Kemudian barulah membakarnya.

"Kalo pembakaran sampahnya tiap hari, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Sampah yang kering hanya butuh sejam agar bisa terbakar hingga jadi abu. Sementara sampah yang basah membutuhkan tiga jam," kata Ratnawati. •Muiz

## Dukuh

# Mimpi Kampung Hijau dan Asri

Ayo Selingkuh, upaya Desa Dukuh menggerakkan penghijauan kampung. Seperti apa?



M. Bisri (Kuwu Desa Dukuh)

Berada di bagian utara Kabupaten Cirebon, Desa Dukuh Kecamatan Kape-takan memiliki mimpi untuk menjadi desa yang hijau dan asri. Mereka pun telah mengemasnya dalam sebuah program penghijauan yang bertajuk Ayo Selamatkan Lingkungan Hidup (Ayo Selingkuh).

Program Ayo Selingkuh ini, merupakan inisiasi dari Pemdes Dukuh sejak awal 2021 dengan melakukan penanaman pohon guna mencegah terjadinya bencana alam. Di sepanjang tanggul Kali Malang misalnya, tampak berjejer puluhan bibit pohon albasiah dan sengo yang telah berdiri.

Selain penanaman di sekitar tambak, Pemdes Dukuh juga mendorong para warganya untuk menanam jenis pohon yang ekonomis di setiap halaman rumah seperti melinjo, kelengkeng hingga mangga.

"Penerapan yang kami lakukan dengan menyosialisasikan kepada masyarakat dengan gerakan satu rumah satu pohon," jelas Muhammad Bisri, Kuwu Desa Dukuh.

Bisri berharap, selain untuk penghijauan, penanaman di halaman rumah warga nantinya akan mampu meningkatkan perekonomian pada jangka panjang. Ia pun mencanangkannya pada

lima tahun kedepan yang hasilnya akan bermanfaat bagi warga, baik untuk dijual langsung maupun dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

"Makanya, saya pengennya satu varietas tanaman saja tiap rumah biar jelas kalkulasinya, misal satu pohon bisa menghasilkan berapa kilogram. Dikali ada berapa batang pohon yang ditanam warga," ucapnya.

Bisri mengaku, kendala saat ini adalah proses merawat dan menjaga pohon agar tetap tumbuh. Pasalnya tanaman yang berada di sekitar tanggul belum disediakan penjaga.

"Karena kalau di tanggul pohon jenis kayu-kayuan. Akibatnya pohon yang ditanam itu kadang-kadang dimakan sama kambing," ujar Bisri, sambil terkekeh.

Sementara untuk bibit pohon buah-buahan, Bisri juga sedikit kesusahan mencarinya. Selama ini, bibit pohon yang ditanam oleh masyarakat Desa Dukuh diperoleh Pemdes dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cirebon.

"Ya susah-susah gampang seperti bibit melinjo. Kita minta bibit tersebut ke Dinas, kalau tidak ada ya nanti saya akan anggarkan dari dana desa saja," tuturnya.

Bisri berharap, program Ayo Selingkuh ini dapat bersiner-gi dan dijalankan oleh seluruh aparatur desa serta masyarakat, supaya mimpi Desa Dukuh yang hijau nan asri dapat terwujud.

•Soy

## Gegesik Kulon Canangkan Jadi Penopang Pangan

Sempat menjadi satu-satunya wilayah tertinggal di Kecamatan Gegesik, Desa Gegesik Kulon bertransformasi menjadi salah satu desa terbaik di Kabupaten Cirebon. Bagaimana langkahnya?



Gatot Sutrisno (Kuwu Desa Gegesik Kulon)

Sebuah desa di Kecamatan Gegesik ini mulanya adalah wilayah tertinggal. Kondisinya di tahun 2016 silam menjadi keprihatinan pemdes serta warga setempat lantaran ketimpangan kesejahteraan sosial. Namun, ketekunan mereka dalam meredakan persoalan tersebut alhasil berbuah manis. Kini, Desa Gegesik Kulon tengah bertransformasi menjadi desa maju.

Dalam mewujudkan itu, Kuwu Desa Gegesik Kulon Gatot Sutrisno membeberkan, langkah pemdes dalam menata kembali pembangunan desa. Diantaranya perbaikan infrastruktur desa dan ketahanan pangan. Namun

sebelum itu perlu membangun komunikasi yang baik antar aparat desa dan warga.

“Langkah awal kami kita perbaiki komunikasi antara warga dan aparat desa yang sempat terputus. Kunci utamanya itu, agar terciptanya gotong royong,” ujarnya.

Selanjutnya, Pemdes Gegesik Kulon melakukan perbaikan infrastruktur desa berupa pembangunan jalan beton. Dari sepanjang 300 meter jalan di Desa Gegesik Kulon, 90 persen perbaikan telah berhasil direalisasi. Infrastruktur menuju area persawahan pun tak luput dibenahi, mengingat sebagian besar warga

adalah para petani.

Setelah itu, pemdes juga membenahi sektor ketahanan pangan. Sebelumnya, tantangan di sektor pertanian muncul di tahun pertama setelah gagal panen. Sehingga, mereka pun mencoba membenahinya melalui program percepatan tanam.

Melalui program itu, Pemdes Gegesik Kulon mengganti varietas bibit tanam yang semula bibit muncul menjadi biji panjang ciherang. Peralnya secara tanam, bibit muncul mampu menghabiskan waktu 4 bulan. Sementara biji panjang ciherang hanya butuh waktu tanam 3 bulan baik di musim kemarau maupun penghujan.

“Secara waktu dipersingkat jadi 3 bulan, dan secara produksi bisa mencapai 400 ton. Alhamdulillah ternyata diluar dugaan kami,” jelas Gatot.

Gatot mengaku, semestinya Desa Gegesik Kulon mampu melakukan masa tanam dan panen hingga tiga kali. Namun penyebabnya masih ada kendala infrastruktur lain yang belum sempat dibenahi.

Ia pun berharap, Desa Gegesik Kulon bisa menjadi penopang pangan sebagaimana program harapan pemerintah Kabupaten Cirebon. “Kecamatan Gegesik adalah wilayah pertanian yang luasnya 5200 hektar. Sangat mungkin untuk menjadi penopang pangan,” tandasnya.

•Sar

## Karangwareng Rencana Tingkatkan PAD dengan Pamsimas

Pemdes Karangwareng tengah berupaya menggalakkan program penyediaan air bersih sebagai solusi kekurangan air hingga peningkatan PAD. Bagaimana caranya?



Eti Rustiati (Kuwu Karangwareng)

Warga desa Karangwareng sering mengeluhkan kekurangan air jika musim kemarau tiba. Mereka mengalami kekeringan karena kondisi tanahnya yang gersang. Permasalahan ini sudah berlangsung lama. Meski telah memiliki sumur, namun masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih.

Kondisi demikian yang membuat pemerintah Desa (Pemdes) Karangwareng harus memutar otak mencari solusi. Alhasil mereka pun menggalakan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas).

“Dulu memang di sini kalau saat musim kemarau sangat

kekurangan air. Mulai itulah saya bertekad membenahi,” jelas Eti Rustiati, kuwu Karangwareng.

Eti mengaku, program Pamsimas diluncurkan sejak tahun 2015 di dusun 3. Kemudian bertambah pada 2017 di dusun 2. Terakhir pada tahun 2020 di dusun 1.

“Alhamdulillah keberadaan Pamsimas sudah bisa mendistribusikan air bersih ke ratusan warga. Saya merasa senang semua tujuan perlahan sudah terealisasi semua. Saya berharap pengadaan air ini menjawab semua keresahan masyarakat,” jelasnya.

Eti pun berencana, akan terus menambahkan jumlah Pamsimas yang akan ia anggarkan dari dana desa pada termin dua

nanti. Peralnya selain mengentaskan persoalan kekurangan air, Pamsimas ini, juga bertujuan mendongkrak pendapat asli desa (PAD) Karangwareng yang dikelola bumdes.

“Saya harap pamsimas bisa tingkatkan PAD nantinya. Mengingat selama ini PAD di Desa Karangwareng hanya mengandalkan sektor pertanian saja. Itu pun dari tanah titisara sekira Rp 20 jutaan pertahunnya. Tadinya saya ingin membangun destinasi wisata namun terlampaui tanah kita gersang. Jadi sementara ini Pamsimas jadi satu-satunya harapan,” terangnya.

Perempuan yang sedang menjabat kuwu pada periode kedua ini menceritakan, jika program Pamsimas tersebut, berangkat dari visi dan misinya saat mencalonkan diri sebagai kuwu. Peralnya banyak sekali keresahan masyarakat yang menginginkan perubahan terutama dalam infrastruktur jalan dan pengadaan penyediaan air bersih.

Saat terpilih, ia pun merealisasikan janjinya dengan gebrakan besar untuk membangun desa agar lebih baik.

“Saat pertama kali menjabat, saya mengadakan pembenahan jalan rusak perlahan mulai diperbaiki untuk mengurangi angka risiko kecelakaan. Periode kedua, kita akan fokus pada Pamsimas ini,” pungkasnya. •Lan

Mohamad Luthfi



## Nyate Bro

Jika ingin mendunia, belajarlah sama sate. Sekilas ini terkesan *lebay*. Tapi begitulah adanya. Sate kini telah menjadi kuliner mancanegara.

Ketenarannya membuat ia masuk dalam kosa kata Bahasa Inggris, kata 'sate' diserap menjadi *satay*. Dalam *Oxford English Dictionary* dijelaskan bahwa *satay* merujuk pada kuliner sate asli Indonesia.

Namun, benarkah kata 'sate' atau sate merupakan makanan asli Indonesia? Beberapa sumber mengatakan bukan asli Indonesia. Konon, sate merupakan serapan dari Bahasa Tamil: *catai*. Kata ini berarti daging.

Serapan itu berhubungan erat dengan sejarah sate masuk ke Jawa. Pada Abad ke-15, makanan ini dikenalkan oleh para pedagang Arab, Gujarat, dan India, sebagai kebab. Namun, karena terbuat dari *catai* (daging), lidah Nusantara pun menyebutnya dengan sate.

Sate di negara lain dikenal dengan Yakitori (Jepang), Espetadas (Portugal), Satti (Filipina), Suya (Nigeria), Dakkochi (Korea), Brochette (Perancis), Chuanr (Cina), dan Kebab (Timur Tengah).

Uniknya, ia terkenal bukan karena sesuatu yang bombastis dan menghebohkan. Ia mendunia justru karena kesederhanaan dan kemudahan dalam membuatnya. Persis seperti sepakbola, ia menjadi olahraga yang merakyat karena mudah dan tidak perlu peralatan macam-macam. Cukup ada bola (meski dari plastik), gawang dari sandal atau batu, jadilah permainan sepakbola yang menyenangkan.

Sate juga dibuat tidak perlu bumbu macam-macam, dan tidak perlu keahlian sebagai chef. Cukup diiris, ditusuk, lalu dipanggang di atas bara, selesai. Langsung bisa dinikmati. Meski tanpa bumbu sudah lezat dan gurih.

Saking mudahnya... Saat idul adha, siapaun bisa jadi tukang sate. *Ngipit* dimana-mana, mudah, lezat, asyiknya rame-rame. Karena itulah, sate seolah menjadi kata wajib dalam kalimat sapaan: "Wis nyate durung bro?"

Di dalam kesederhanaan nyate saat idul qurban, ternyata ada simbol nasionalisme, setidaknya sebagai bentuk pengamalan Pancasila. Anda boleh menyebut ini cocoklogi, tapi ini pelajaran yang bisa kita ambil dari kesederhanaan nyate.

Pertama jelas sebagai bentuk pengamalan sila pertama. Berqurban adalah perintah agama. Pemotongan hewan qurban juga sebagai simbol bahwa kita bertekad membunuh sifat kebinatangan dalam diri kita. Manusia harus berkiprah sebagai manusia, dengan keberadaban dan keadilan yang selalu ditegakkan.

Sate juga memberikan pelajaran persatuan. Dalam satu tusuk sate terdiri dari beberapa jenis daging, gajih, hati, bahkan torpedo (testikel). Berbeda 'suku' tapi tetap satu. Bahkan, potongan daging juga ada yang kecil dan besar, tak jadi soal. Berbeda 'derajat potongan' tetap rukun berdampingan.

Gotong royong, kerjasama, saling membahu saat nyate adalah pelajaran demokrasi yang sangat berharga. Betapa demokrasi jika dijalankan dengan riang gembira berjalan begitu indah. Tak perlu ada gebrak meja, kursi terbang, saling nyinyir, atau bahkan baku hantam.

Riang gembira juga membuat pekerjaan dijalankan dengan ringan, suka rela, dan tidak ada yang merasa didholimi secara sosial akibat pembagian pekerjaan yang tidak merata. Begitupun saat menikmati sate, keadilan tidak harus dibagi rata, cukup dinikmati bersama, makan semampunya, semua bahagia.

Lengkap sudah pelajaran pengamalan lima sila dari sate idul adha. Untuk itu, mari tetapkan mengarungi hidup dalam kesederhanaan, namun diliputi kelezatan. Juga, mari amalkan Pancasila dengan riang gembira, tanpa sindiran, nyinyiran, maupun klaim-klaim.

Sederhana dan riang gembira, akan membuat hidup lebih berwarna. Jika, kita sudah merasa ruwet, suntuk, dan jenuh, jangan lupa *nyate dulu Bro !!!*



SEKRETARIS DPRD DAN SELURUH PEGAWAI

SELAMAT MERAYAKAN  
**Idul Adha**  
 1441 H

Semoga semangat berqurban  
 tetap teguh dan ikhlas

Tetap patuhi protokol kesehatan



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON



**MARI QURBAN  
TINGKATKAN IMAN  
TETAP PATUHI  
PROTOKOL KESEHATAN**